BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemakaian teknologi komputer dalam segala bidang kehidupan sehari-hari tidak akan dapat dihindari. Bahkan, penggunaan teknologi komputer tersebut akan menjadi syarat utama untuk menunjukkan kualitas sesuatu bidang dan menjadi modal terpenting dalam memenangkan persaingan.

Kemampuan komunikasi antara satu bidang dengan bidang lainnya di tempat yang berbeda (terpisah pada jarak yang jauh) merupakan salah satu ciri era globalisasi mendatang. Sedang tiang utama teknologi komunikasi yang dimaksud adalah teknologi. komputer, yaitu berupa peralatan-peralatan komputer dan aksesorinya, teknologi 'networking' antara peratalan-peralatan tersebut, dan akhirnya adalah perangkat lunak serta operator (tenaga manusia) yang menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Pada saat itu, kualitas sebuah sistem kehidupan tertentu, akan ditentukan oleh kemampuannya mengolah komunikasi tersebut, yang secara khusus pula berarti kemampuannya dalam memiliki teknologi komputer yang baik.

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya.

Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu

lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjada pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Begitu juga dengan maraknya lalu lintas antar negara, tak heran Orang asing banyak yang memilih untuk tinggal di Indonesia. semakin besarnya jumlah individu asing yang berkepentingan untuk masuk ke Indonesia baik untuk kepentingan bisnis, dinas ataupun kepentingan pribadi, maka selain urusan pembuatan paspor, Kantor Imigrasi juga adalah tempat perizinan atas orang asing untuk izin keluar dan masuk kembali ke Indonesia yang disebut dengan Exit Reentry Permit.

Banyaknya jumlah permintaan pembuatan ERP (Exit Reentry Permit), maka Kantor Imigrasi telah membuat sebuah sistem pengolahan data yang cukup baik.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

   Masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan kurang efektifnya sistem informasi yang berjalan pada proses menentukan masa berlaku ERP.

b. Rumusan Masalah

   1. Bagaimana sistem informasi yang berjalan pada proses menentukan masa berlaku ERP.
   2. Bagaimana sistem informasi yang diusulkan pada proses menentukan masa berlaku ERP.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan Exit re-entry permit.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam proses permohonan Exit re-entry permit.
3. Untuk menemukan solusi dari kendala – kendala yang dihadapi dalam proses permohonan Exit re-entry permit.

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan survei terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka penulis menetapkan pembatasan menjadi beberapa batan antara lain :

1. Sistem yang dikaji hanya sistem pembuatan Exit Reentry Permit.
2. Tidak membahas secara keseluruhan mengenai Sistem Informasi Keimigrasian
3. Terfokus pada pengusulan prosedur mengenai penetapan masa berlaku ERP

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung.

Jl. Surapati no. 82, Bandung.

b. Waktu Penelitian

Berikut adalah tabel jadwal pelaksanaan kerja praktek penulis di Kantor Imigrasi Klas I Bandung

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Tahap	July 2010				Agustus 2010
		I	II	III	IV	I
1	Penyusunan Proposal					
2	Survei Objek Penelitian					
3	Studi Kepustakaan					
4	Pengumpulan data					
5	Pembuatan laporan					

1.6. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga jenis teknik pengumpulan dan analsis data yang bisa digunakan dalam audit komunikasi, yakni :

1. **Teknik observasi,** merupakan kegiatan mengamati dan mencatat perilaku serta mengamati kegiatan apa saja di Kantor Imigrasi.
2. **Teknik wawancara,** merupakan wawancara langsung kepada pihak kantor imigrasi yang meliputi seluruh aktivitas yang berlangsung di Kantor Imigrasi.
3. **Teknik analisis,** merupakan analisis langsung dari penulis terhadap perilaku, kegiatan ataupun yang lainnya yang terjadi di Kantor Imigrasi.